

# **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 1991 - 2005**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1**

**Program Studi Ilmi Ekonomi,  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**



**Oleh**

**Nama : Reza Yudhistira  
Nomor Mahasiswa : 03.313.016  
Program Studi : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2007**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Reza Yudhistira

**PENGESAHAN**

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat  
Kemiskinan Di Indonesia Periode 1991 - 2005**

**Nama : Reza Yudhistira**  
**Nomor Mahasiswa : 03.313.016**  
**Program Studi : Ilmu Ekonomi**



Yogyakarta, 18 Januari 2008  
Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,

Dr. Jaka Sriyana SE., M.Si



## **MOTTO**

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.*

*(QS. Al Baqarah)*

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*

*(QS. Al Mu'minun:62)*

*Sesungguhnya sesudah Kesulitan itu ada kemudahan.*

*(Al Hadist)*

*Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna.*

*(H. A. Mukti Ali)*

*Kemalasan tidak lebih dari kebiasaan beristirahat saat belum letih.*

*(Jules Renard)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ◆ *Allah SWT, arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku sangat berarti.*
- ◆ *Ayahku H. HAERUDIN SE. dan Ibuku Hj. Rohana S.sos. pengukir jiwa ragaku yang selalu mendo'akanku.*
- ◆ *Kakakku Lina dan Kakak iparku Haris yang memberikan dukungannya.*
- ◆ *Adikku Rizky sebuah tanggung jawab yang besar untukku.*
- ◆ *Keponakanku yang lucu-lucu Nita dan Nisa kalianlah motivasi terbesar dan penghibur dalam hidupku.*
- ◆ *Kekasihku tersayang uwie-ku, salah satu alasan yang memberiku kekuatan untuk aku terus semangat.*
- ◆ *Sahabat dan teman-temanku, pemberi warna dalam hidupku.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kekuatan yang diberikan Allah padaku untuk bisa berjuang menyelesaikan amanah dan segala kewajibanku sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN Di INDONESIA PERIODE 1991-2005**. Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun yang telah dan akan penulis terima. Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Jaka Sriyana SE.,M.Si.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, arahan, dan motivasi dengan segala ketelitian dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan Ilmu yang sangat berharga terutama Priyonggo Suseno,SE.,M.Sc.selaku Pembimbing akademik.
4. Ayahku & Ibuku tercinta yang selalu menguatkan diriku dengan kasih sayangnya dan do'anya.
5. Kakakku Lina,Kakak iparku Haris dan adikku Rizky terima kasih atas dukungannya selama ini.
6. Keponakanku tersayang Nita dan Nisa yang membuat hari-hariku tetap ceria akan senyummu.
7. Uwie tersayang atas semangat dan dukungannya, sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kak Rudy "Brother", Adek Risa, Erpan "Pengong" dan Adek Andi Makasi atas perhatiannya selama ini.
9. Teman-teman IE '03 Avin "Pongok", Adi "Jupry", Asep "BMG", Mansur "Duro", Tile, Citra, Wisnu, Nophal, Narto, Aripin, Amen, Amar, Rohman, Bagus "Pak Lurah", Ria "Ndut", Hana, Nelly, Dewi SE., Metha SE., Iroel, Adi"Brebes", Najib, Minggu, Danang, Sap Riyandi,", Huda "Sidney", Syifa, Brian, Ajay, Asnan, Alex, Daniel, Kanthi semua anak-anak IE 2003 kalian semua selalu menjadi salah satu cerita terindah dihati.
10. Kakak-kakak IE '01 dan '02 Thomas, Donny, Yayak, Kepet, Dwi, Anshor, Agung. Makasih atas bantuannya selama ini.
11. Teman-teman yang tidak akan kulupa juga Q-noy, Indra "Mr. TT", Bang Aan, Surya, Ari "Dagoel", Andi "Betet", Edo, Unta, Bang Ramu "Kapten"

dan anak2 Team”PSYCHO” Makasi atas semua kegilaan yang nggak mungkin tergantikan.

12. Teman-teman KKN unit 30 angkatan 32, Aji, Billy, Farah, Fian, Ima, Mia, Nita, Rendy, Tommy, Makasi atas kekompakannya selama ini.

13. “DR 1802 AF” yang telah menemaniku melangkah selama ini dengan petualangan dan pengalaman yang tak terlupakan.

14. Semua pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberi masukan-masukan dan bantuan guna penyelesaian skripsi ini.

Thanks Bro!.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Amien. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Yogyakarta, Januari 2008

Penulis

Reza Yudhistira

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II    KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Hubungan Antara Variabel .....	39
2.4 Hipotesis .....	42
BAB III   METODE PENELITIAN .....	43
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	43
3.2 Variabel Penelitian & Definisi Operasional.....	43
3.3 Metode Analisa Data.....	44

BAB IV	ANALISIS dan PEMBAHASAN .....	53
	4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	53
	4.2 Hasil dan Analisa Data.....	53
BAB V	KESIMPULAN dan IMPLIKASI	
	5.1 Kesimpulan.....	66
	5.2 Implikasi.....	67
	5.3 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Indeks Gini .....	17
Tabel 2.2 Persentase Indeks Gini .....	24
Tabel 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	36
Tabel 2.4 Pengangguran Terbuka.....	37
Tabel 2.5 Pengangguran Terbuka & Pekerja Sektor Informal .....	40
Tabel 4.1 Uji Normalitas .....	54
Tabel 4.2 Uji Multikolonieritas .....	55
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	55
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi .....	57
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Regresi .....	58
Tabel 4.6 Daftar t Tabel & t Hitung .....	63

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	20
Gambar 3.1 Kurva Durbin Watson .....	48
Gambar 4.1 Kurva Durbin Watson .....	57
Gambar 4.2 Kurva Normal Uji t Dua Sisi.....	60
Gambar 4.3 Kurva Normal Uji t Dua Sisi.....	61
Gambar 4.4 Kurva Normal Uji t Dua Sisi.....	62
Gambar 4.5 Kurva Normal Uji t Dua Sisi.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1991-2005

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 4 Uji Normalitas

Lampiran 5 Uji Multikolonieritas

Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 7 Uji Autokorelasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya pengukuran kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berhubungan dengan kemiskinan karena seseorang tidak mampu memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Todaro (1997) menyatakan bahwa seseorang dapat hidup layak jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan jika pendapatnya tidak memenuhi kebutuhan minimumnya, maka ia dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin (garis batas kemiskinan). Kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi seseorang dibanding konsep dengan orang lain atau kurun waktu tertentu. Nasaban (2004) berpendapat bahwa memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut dikatakan masih berada dalam kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000 mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin dan kekurangan pangan di masing-masing negara hingga mencapai 50% pada tahun 2015 (Putra, 2007).

Dalam konteks menyikapi perkembangan kemiskinan di Indonesia, pakar kemiskinan Gunawan Sumodiningrat menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bisa dikatakan hampir berhasil mengatasi kemiskinan. Disebutkan bahwa selama tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau 40% dari jumlah penduduk (1976) turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% (1996). Krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 23,4 % pada tahun 1999, yang merupakan akibat dari banyaknya perusahaan atau sentra ekonomi menghentikan kegiatan ekonomi sehingga bertambahnya angka pengangguran. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37 juta jiwa atau sekitar 19%, dan mulai turun pada tahun 2002 menjadi 18,2 %, dan kembali turun menjadi 17,4% di tahun 2003. Namun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di akhir tahun 2004 yaitu sebesar 54 juta jiwa (Putra, 2007).

Pada akhir masa orientasi *Gross National Product* (GNP), para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di banyak Negara sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun GNP mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu mulai awal tahun 1970-an muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin maka mustahil akan

memberikan hasil yang optimal. Dalam periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan Distribusi New Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passinetti (1962) dalam Octaviani (2001). Secara umum teori tersebut menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai keberhasilan yang optimal bila peningkatan GNP disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan GNP seharusnya diimbangi dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 1996).

Sejalan dengan semakin berkembangnya pendapat bahwa pembangunan ekonomi akan memberikan hasil yang lebih optimal jika peningkatan GNP disertai dengan perbaikan kualitas hidup bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang berpendapatan rendah, para ahli ekonomi mencoba menganalisa dan meramalkan tentang pengaruh dari variabel-variabel ekonomi makro tertentu terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh Powers (1995a) yang menghasilkan temuan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai variabel ekonomi makro, seperti tingkat pengangguran dan inflasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 1991 – 2005**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Apakah faktor tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah faktor tingkat inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah faktor tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah faktor indeks gini mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia?
5. Apakah tingkat pengangguran merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh indeks gini terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai bermanfaat untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Memberikan informasi pada instansi yang terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan di bagi menjadi 5 bab yaitu :

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB. II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama teori-teori yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

### BAB. III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data-data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### BAB. IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data secara statistik dan analisis pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

### BAB. V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 KajianPustaka

Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti antara lain meliputi:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Adelman dan Morris (1973) dalam Octaviani (2001) mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif, tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan absolut dan tingkat pengangguran. Besarnya atau dimensi kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahluwalia (1976) dalam Octaviani (2001) berdasarkan data *cross section* dari berbagai negara berkembang mengungkapkan bahwa meskipun proses pembangunan ekonomi memang menyebabkan pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, namun tingkat pendapatan absolut dari golongan miskin tidak merosot. Dengan perkataan lain, meskipun ketimpangan relatif bertambah besar dengan pembangunan ekonomi, namun kemiskinan absolut tidak bertambah gawat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahluwalia, Charter dan Chaeneray (1975) dalam Octaviani (2001) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

kemiskinan absolut diberbagai negara berkembang selama kurun waktu 1960-1975 mengungkapkan bahwa persentase golongan penduduk yang miskin dari semua negara berkembang telah berkurang dari 50,9% - 38,0%, suatu pengurangan yang tampaknya cukup mengesankan. Namun pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara berkembang telah menyebabkan permasalahan bahwa secara absolut jumlah orang yang miskin pada periode tersebut telah bertambah dari 567 juta menjadi 644 juta orang.

Sejumlah penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan juga telah dilakukan, antara lain oleh Blank&Blinder (1986), Cutler&Katz (1991), Mocan (1995), dan Powers (1995a) dalam Octaviani (2001) menghasilkan temuan tentang adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai variabel ekonomi makro. Penelitian-penelitian tersebut juga membuktikan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi keduanya berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemiskinan, sementara inflasi hanya memberikan pengaruh yang relatif kecil.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Powers (1995b) dalam Octaviani (2001) menemukan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan dan positif antara inflasi dan tingkat kemiskinan bila tingkat kemiskinan tersebut diukur dari sisi konsumsi.

Berarti bahwa ada kemungkinan bahwa inflasi sebenarnya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemiskinan daripada yang diperkirakan selama ini.

Di Indonesia penelitian tentang kemiskinan dilakukan oleh Octaviani (2001) yang memperlihatkan hasil bahwa pada estimasi data atas 27 Propinsi di Indonesia pada tahun pengamatan (1996) terbukti bahwa inflasi dan pengangguran bersama-sama dengan variabel lain yaitu rasio antara garis kemiskinan dengan pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan sebelumnya, variabel demografis serta rasio gini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan baik yang dihitung melalui *headcountpovert*, *poverty gap squared* *poverty gap*.

## 2.2 Landasan Teori

Masalah kemiskinan mulai memperoleh porsi perhatian yang lebih besar sejak periode tahun 1970, ditandai dengan perubahan pendapat pemerintah dan kalangan swasta tentang sifat-sifat pokok kegiatan ekonomi (Todaro 1985). Banyak negara baik kaya maupun miskin yang kecewa dalam usahanya mengejar pertumbuhan pendapatan seagai tujuan utama pembangunan, karena ternyata peningkatan pendapatan tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Negara-negara maju, yang lebih menekankan pada "kualitas hidup" yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam dan mengurangi kualitas

lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ricardo & Malthus dalam bukunya *The limits to Growth* (1972) yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang terbatas tidak dapat terus menerus menopang tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa diikuti oleh malapetaka dalam perekonomian dan masyarakat.

Sementara itu di kelompok negara-negara yang sedang berkembang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960-an sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kemakuran bagi ratusan juta masyarakat Afrika, Asia dan Amerika Latin pada periode tersebut tidak mengalami peningkatan malah menurun dalam nilai riilnya. Angka pengangguran dan pencari kerja terus meningkat baik di desa maupun di kota, sementara tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin tidak merata dari tahun ke tahun.

### **2.2.1 Masalah Kemiskinan**

#### **2.2.1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia**

Masalah kemiskinan masih merupakan masalah besar bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan ekonomi selama ini. Cukup banyak studi telah dilakukan mengenai kemiskinan di Indonesia, tetapi hasil atau gambaran yang diperoleh bermacam ragam karena pendekatan yang digunakan juga berbeda. Terlebih lagi pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antar propinsi atau antar daerah, disebabkan karena perbedaan variasi

komposisi bahan kebutuhan pokok dan tingkat harga yang berbeda-beda di masing-masing daerah selain masalah selera, tingkat dan jenis kegiatan ekonomi, barang yang tersedia dan lainnya.

Data yang ada menunjukkan bahwa selama PJPT I jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahunnya selalu menurun. Pada tahun 1976 tercatat sekitar 54,2 juta penduduk Indonesia atau 40,08% dari keseluruhan jumlah penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,5 juta orang (11,3%) terdiri dari 7,2 juta orang penduduk perkotaan (9,7%) dan 15,3 juta orang (12,3%) penduduk daerah pedesaan.

Menurut propinsi berdasarkan data BPS diketahui bahwa sekitar 56,2% dari jumlah penduduk miskin berada di Jawa, 19,6% berada di Sumatera, 7,8% di Kalimantan, 5,1% di Sulawesi dan selebihnya ada di Bali, Nusatenggara, Maluku dan Papua. Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduk di Jawa dan Bali yang relatif sangat tinggi. Fakta ini cenderung mengatakan bahwa terdapat suatu hubungan positif antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat kemiskinan.

#### **2.2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Utama Kemiskinan**

Tidak terlalu sulit dalam menentukan faktor-faktor penyebab tingkat kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut lebih sulit untuk memastikan mana yang merupakan penyebab utama atau faktor mana yang mempunyai pengaruh

langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan (Tambunan, 1995). Sebagai suatu contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tidak lulus SD misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama di sektor modern (formal) dengan pendapatan yang baik tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan tingkat pendidikan yang rendah itu merupakan penyebab utama? Apabila banyak penduduk Indonesia hanya berpendidikan SD karena sewaktu anak-anak orang tua mereka tidak sanggup membiayai pendidikan lanjut mereka, maka jelas dalam hal ini penyebab sebenarnya adalah masalah biaya atau lebih tepatnya lagi adalah karena kemiskinan (orang tua mereka). Jika diteruskan ke belakang pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang tua mereka miskin? Apakah juga karena pendidikannya rendah? Jadi terdapat semacam *vicious circle* dalam masalah timbulnya kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. Jika tingkat pendidikan yang rendah merupakan titik awal permasalahan, tetap bisa dipertanyakan: apakah karena memang pendidikannya yang terlalu rendah maka seseorang lalu menjadi miskin? Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, misalnya Eropa Barat atau Amerika Serikat, seorang montir mobil dengan pendidikan kejuruan yang setingkat dengan SMU atau Diploma Dua jauh lebih makmur daripada rekannya dengan keahlian yang sama di Indonesia. Berarti penyebabnya bukan semata-mata karena pendidikan yang rendah tetapi karena tingkat upah atau gaji yang berbeda dan ini selanjutnya disebabkan oleh sejumlah faktor lain, termasuk sistem penghargaan serta kinerja

usaha yang berbeda. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat setiap jenis pendidikan atau keahlian sudah memiliki bidang kegiatan (sektor atau subsektor) sendiri, dan memperoleh penghargaan yang baik sesuai dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan resiko yang terkandung dalam pekerjaan, serta produktivitas pekerja. Sedang di Indonesia, banyak bengkel mobil atau motor hanya merupakan kegiatan informal dengan tingkat upah yang rendah.

Jika ditinjau lebih lanjut, jumlah faktor yang dapat mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas), tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja, motivasi kerja, kultur/budaya atau tradisi, politik, bencana alam hingga peperangan. Jika diamati sebagian besar dari faktor-faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Misalnya tingkat pajak yang tinggi menyebabkan upah netto menjadi rendah, dan ini dapat mengurangi motivasi kerja dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktivitas yang menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netto menjadi kecil, demikian seterusnya. Jadi dalam kasus ini tidak mudah memastikan penyebab utama dari kemiskinan.

### 2.2.1.3 Kebijakan Dasar Pengetasan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: (1) kebijaksanaan yang tidak langsung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan (2) kebijaksanaan yang langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tentram, ekonomi yang stabil, dan budaya yang berkembang. Upaya pengelolaan ekonomi makro yang hati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan perpajakan, pengendalian tingkat inflasi, penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskin. Kebijaksanaan di bidang kependudukan terutama program keluarga berencana yang diarahkan pada penduduk miskin sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu lingkungan hidup yang lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

Sementara itu kebijaksanaan yang langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan mencakup:

- 1) Pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran (targeting)
- 2) Penyediaan kebutuhan dasar pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan
- 3) Penciptaan kesempatan kerja seperti magang, program padat karya

- 4) Program pembangunan wilayah seperti inpres, PPW, transmigrasi, PIR, dan PKT
- 5) Pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan FID, BKD, P4PK, PHBK, KCK, KUD, dan lembaga kredit pedesaan lainnya.

Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Dalam kelembagaan yang didasari kebersamaan, maka kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk miskin diharapkan mendorong kemandirian dan berkembang secara berkelanjutan. Keberhasilan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau penduduk miskin tidak semata-mata ditentukan oleh adanya dana, tetapi ditentukan oleh keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### **2.2.1.4 Indikator Kemiskinan**

Dalam masalah kemiskinan, indikator yang sering digunakan adalah pengukuran garis kemiskinan. Secara umum garis kemiskinan diukur dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan non makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa termasuk pendidikan dan kesehatan. Sayogyo & Sam F. Poli dalam Octaviani (2001) menentukan garis kemiskinan menggunakan

ekuivalen konsumsi beras per kapita per tahun sebanyak 240 kg untuk daerah pedesaan dan 360 kg untuk daerah perkotaan. Ravallion&Huppi menggunakan Rp.10.000,- per kapita per bulan yang setara dengan US \$ 31(berdasarkan tingkat harga 1984). Untuk daerah pedesaan dan 10% lebih tinggi untuk daerah perkotaan (Ravallion&Huppi, 1989), Bidani& Ravallion (World Bank II Method) mengestimasi *Food Poverty Bundle* dengan standar 2100 kalori per hari tanpa membedakan jenis konsumsi di desa dan di kota, kemudian menghitung nilainya dengan menggunakan harga lokal. Sedangkan untuk menghitung *Non Food Poverty Bundle* digunakan persamaan *working lesser* (Bidani & Ravallion, 1993), Sedangkan BPS sejak tahun 1993 mengestimasi *Food Poverty Bundle* yang setara dengan 2100 kalori per orang per hari dengan membedakan jenis konsumsi di desa dan kota untuk mengakomodasi perbedaan jumlah dan jenis konsumsi yang berbeda, kemudian menambahkannya dengan *Non Food Poverty Bundle* untuk mendapatkan nilai garis kemiskinan di setiap garis kemiskinan di setiap daerah.

### **2.2.2 Distribusi Pendapatan**

Di Indonesia strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Ini sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan hasil-hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

### 2.2.2.1 Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah indeks gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: (1) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (2) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% - 17% bagian pendapatan; (3) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Tabel 2.1  
Persentase Pembangunan, Pendapatan, Indeks Gini Indonesia  
Berbagai Tahun ( 1976-2004)

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
1976	19,6	38,0	42,5	34
1978	18,1	36,5	45,3	38
1980	19,6	38,2	42,3	34
1981	20,4	37,5	42,1	33
1984	20,8	37,3	42,0	33
1987	0,9	37,5	41,7	32
1990	21,3	36,8	41,9	32
1993	20,3	36,9	42,8	34
1996	20,3	35,1	44,7	35
1998	21,5	36,9	41,5	32
1999	21,5	37,4	41,2	31
2002	20,9	36,9	42,2	32
2003	20,6	37,1	42,3	32
2004	20,8	37,1	42,1	32

Sumber: BPS, 2005

Tabel 2.1 menunjukkan perkembangan distribusi pendapatan di Indonesia tergolong rendah selama 1976-2004 dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 1976 kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah telah menerima 19,6% dari pendapatan. Pada tahun 2004 kelompok tersebut dapat menikmati 20,8% dari pendapatan. Dengan kata lain, pendapatan yang dinikmati 40% kelompok berpendapatan terendah di Indonesia cenderung meningkat selama 1976-2004. Pada tabel tersebut juga memperlihatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia relatif rendah menurut standar Bank Dunia ternyata posisi terbesar pendapatan nasional tetap dinikmati oleh 20% penduduk berpendapatan tertinggi dan 40% penduduk berpendapatan menengah. Pada tahun 1976 kelompok 20% penduduk berpendapatan tertinggi telah menerima 42,5% dari pendapatan; pada tahun 2004 kelompok tersebut dapat menikmati 42,1% dari pendapatan. Pada tahun 1976 kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah telah menerima 38% dari pendapatan; pada tahun 2004 kelompok tersebut dapat menikmati 37,1% dari pendapatan.

#### 2.2.2.2 Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Pada pengukuran ketimpangan, indeks gini adalah yang paling sering dipakai sebagai indikator ketimpangan. Indeks Gini dirumuskan secara konvensional adalah sebagai berikut:

$$G = \sum_{t=1}^{n-1} \eta_t + 1\pi - \sum_{t=1}^{n-1} \eta_t \pi + 1$$

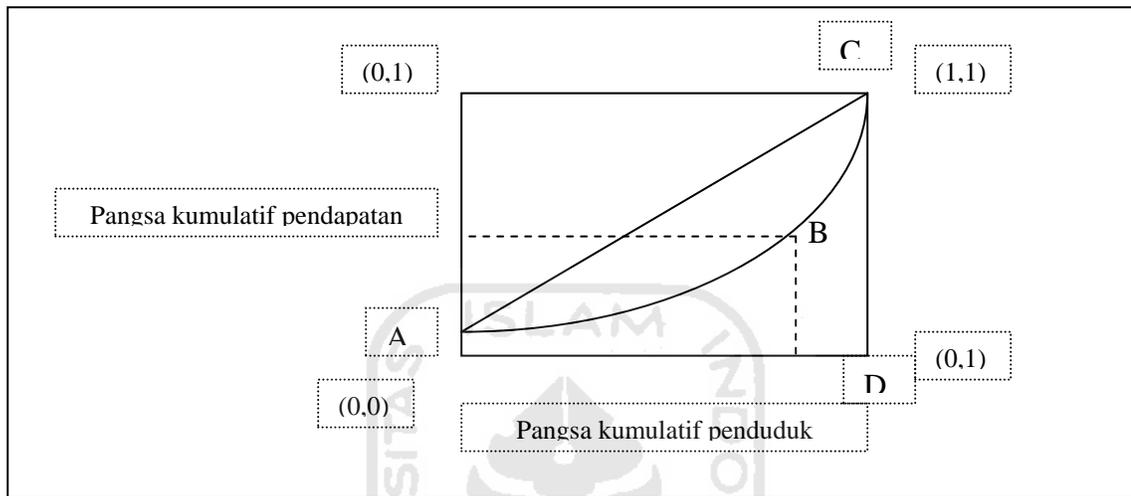
Di mana  $\eta_t$  adalah pangsa kumulatif pendapatan dan  $\pi_t$  adalah pangsa kumulatif penduduk. Salah satu yang menarik dari indeks gini adalah pendekatannya yang langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan di antara setiap pasangan pendapatan, yang sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling populer. Pada kenyataannya pasangan yang diobservasi  $(\eta_1 \pi_1)$ ,  $(\eta_2 \pi_2)$  .....  $(\eta_n \pi_n)$  yang dipakai dalam penghitungan indeks gini digunakan untuk menghasilkan kurva Lorenz. Hal ini dilakukan dengan memplot pasangan pangsa (kumulatif) pendapatan dan penduduk dalam sebuah kotak, seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk seluruh unit masyarakat, sedang nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh 1 orang atau 1 unit saja pada keseluruhan distribusi. Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai indeks gini sebesar 0,4 atau di bawahnya. Ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai indeks gini di atas 0,4 dalam distribusinya.

Perlu dicatat bahwa kadang-kadang indeks gini ditunjukkan dalam bentuk persentase, seperti yang biasa digunakan Bank Dunia. Dalam hal ini secara sederhana dengan cara mengalikan indeks gini dengan 100. Tabel 2.1 menunjukkan perkembangan indeks gini di Indonesia untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan selama 1976-2004 yang berkisar antara 31% -38%, dengan trend yang

menurun. Dengan kata lain, secara umum dengan indeks gini terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang sejalan dengan kriteria Bank Dunia.

Gambar 2.1: Kurva Lorenz



Sumber: Kuncoro (2006)

Indeks gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan penduduk. G adalah indeks gini yang diturunkan dari kurva Lorenz dengan cara membagi daerah yang dibatasi oleh garis diagonal dan kurva Lorenz dengan total daerah pada segitiga yang lebih rendah, yakni:

$$G = \frac{\text{Daerah diantara AC dan ABC}}{\text{Seluruh daerah ACD}}$$

Indeks gini berkisar antara 0 dengan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 maka distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis ini ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna (garis AC dalam gambar 2.1). Namun,

bila indeks gini sama dengan 1 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara, sebaliknya semakin rendah nilai indeks gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya. Ada tiga pola yang menarik pada indeks gini, yaitu: Pertama, terjadi peningkatan indeks gini dari tahun 1990 ke 1996 untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Artinya ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum krisis ekonomi. Kedua, penurunan indeks gini terjadi selama 1998-2004 untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 tampaknya tidak berdampak buruk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Indeks gini justru menurun dari 0,35 pada tahun 1996 menjadi 0,32 pada tahun 1998 artinya, krisis ekonomi malah menyebabkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan. Ketiga, distribusi pendapatan di perkotaan lebih timpang dibanding perdesaan. Indeks gini di perkotaan berkisar antara 0,31 sampai dengan 0,38 sementara di perdesaan berkisar antara 0,24 sampai dengan 0,34 selama periode 1976-2004. Dengan demikian distribusi pendapatan di perdesaan jauh lebih merata daripada perkotaan.

### **2.2.2.3 Trend dalam Distribusi Pendapatan**

#### **1) Kesenjangan Kota dan Desa**

Berbagai hasil studi empiris menunjukkan modernisasi pertanian telah memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons et al (1980) dalam

Kuncoro (2006) menyimpulkan bahwa revolusi hijau telah memperparah kepincangan distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara umum menaik kondisinya sebagai hasil dari modernisasi pertanian, namun posisinya secara relatif lebih buruk dibanding petani kaya yang jauh lebih meningkat penghasilannya. Hasil penelitian dari Arief dan Wong (1997) dalam Kuncoro (2006) membuktikan bahwa di daerah pedesaan Jawa terjadi proses meningkatnya kepincangan pendapatan, seperti ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini dari 0,3048 pada tahun 1970 menjadi 0,3604 pada tahun 1976.

Kendati demikian, data dari BPS (2005) menunjukkan indikasi terjadinya penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di desa selama 1984-2004 (lihat tabel 2.2). Bila dibandingkan dengan indeks gini di kota ternyata indeks gini di daerah pedesaan lebih rendah. Artinya keadaan distribusi di daerah pedesaan relatif lebih merata dibanding di perkotaan. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% tertinggi tetap menikmati porsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 20% penduduk berpendapatan rendah selama periode 1984-2004.

## **2) Kesenjangan Regional**

Isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian antara para pakar ekonomi regional. Esmara (1975) dalam Kuncoro (2006) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antar daerah. Berdasarkan

data dari 1950-1960 menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan.

Ardani (1996) dalam Kuncoro (2006) telah menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson selama 1968-1993 dan 1983-1993 yang menyimpulkan mendukung atas pendapat Williamson (1965) bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, Namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan hasil studi Akita dan Lukman (1994), yang menemukan tidak terdapatnya perubahan kesenjangan ekonomi antar daerah selama 1983-1990.

Dalam konstilasi perkembangan terakhir di Indonesia, kesenjangan ekonomi setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: berdasarkan tingkat kemodernan, regional, dan etnis. Pertama, kesenjangan dari tingkat kemodernan yaitu kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern umumnya berada diperkotaan dan sektor industri; sedang sektor tradisional umumnya berada di perdesaan dan sektor tradisional. Kedua, kesenjangan regional adalah kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin (Kawasan Barat Indonesia). Ketiga, kesenjangan menurut etnis, yaitu kesenjangan antara pribumi dan non pribumi.

Apabila ketiga dimensi ini digabungkan maka akan diperoleh potret kesenjangan, kemakmuran di Indonesia, yaitu: semakin ke Kabarin maka semakin banyak dijumpai sektor modern dan industri, dan semakin banyak golongan non

pribumi yang menguasai perekonomian. Sebaliknya semakin ke Katimin, semakin banyak di jumpai sektor pertanian dan tradisional, dan semakin banyak pribumi yang mendominasi usaha bisnis.

Tabel 2.2  
Persentase Pembagian Pendapatan & Indeks Gini di Desa dan di Kota Indonesia  
1984-2004

Daerah Perdesaan				
Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
1984	22,35	39,35	37,82	0,28
1987	24,30	39,25	36,45	0,26
1990	24,41	39,23	36,36	0,25
1993	25,13	38,43	36,45	0,26
1996	23,20	39,00	37,80	0,27
1998	24,40	39,40	36,20	0,26
1999	24,60	39,50	35,90	0,24
2002	25,80	38,00	36,20	0,25
2003	25,60	39,40	35,10	0,24
2004	24,70	40,00	35,30	0,32
Daerah Perkotaan				
Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
1984	20,63	38,25	41,12	0,32
1987	21,48	39,01	40,51	0,32
1990	19,67	37,66	42,67	0,34
1993	20,48	37,29	42,23	0,33
1996	19,00	36,90	44,00	0,36
1998	20,60	36,80	42,50	0,33
1999	20,50	37,70	41,70	0,33
2002	20,30	38,30	41,40	0,33
2003	20,20	39,00	40,70	0,32
2004	21,20	38,80	40,00	0,31

Sumber: BPS, 2005

Apabila digunakan indikator indeks gini, sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, ternyata cukup bervariasi antar propinsi. Secara nasional indeks gini diperkotaan dan perdesaan cenderung meningkat dari 0,33 pada tahun

1984 menjadi 0,34 pada tahun 1993 (BPS, 1994). Indeks gini yang lebih kecil untuk perdesaan dibanding perkotaan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata di kawasan perdesaan dibanding perkotaan. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh propinsi selama periode 1984-1993. Pada tahun 1984 angka indeks gini di daerah perdesaan berkisar 0,18 sampai 0,33 dengan catatan indeks gini terendah adalah propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993 indeks gini perdesaan berkisar antara 0,20-0,30 dengan rekor terendah dipegang oleh propinsi NTT. Sementara itu di daerah perkotaan rentang indeks gini lebih lebar antara 0,21-0,42 pada tahun 1984 dengan catatan terendah di raih oleh Jambi. Pada tahun 1993 indeks gini daerah perkotaan berkisar antara 0,24-0,37 dengan rekor terendah di pegang oleh Jambi dan Maluku.

### **3) Kesenjangan Interpersonal**

BPS dengan menggunakan biaya konsumsi perkapita untuk memperkirakan indeks gini baik di kota maupun di desa di Indonesia. Di desa, indeks gini menunjukkan perubahan yang sangat kecil pada tahun 1964-1965 sampai 1978, tetapi antara tahun 1978 dan 1984 tampak adanya trend yang menurun. Di kota, indeks gini meningkat sampai tahun 1978, tetapi menurun setelah itu. Trend menurunnya tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dengan data pengeluaran setelah tahun 1978, baik di kota maupun di desa, di konfirmasi dengan indeks gini dengan data pendapatan (Booth, 1992) dalam Kuncoro (2006). Namun data ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pendapatan di desa lebih tinggi daripada di

kota. Hal ini dapat mencerminkan pengeluaran konsumsi atau tabungan yang lebih tinggi di daerah perdesaan.

Hughes dan Islam (1981) dalam Kuncoro (2006) menunjukkan bahwa ada peningkatan yang lebih besar dalam kesenjangan di Jawa di banding daerah manapun antara tahun 1970-1976. Peningkatan kesenjangan ini terutama akibat adanya perubahan distribusi pendapatan pada golongan berpenghasilan tinggi, yang dapat ditafsirkan bahwa yang kaya semakin kaya. Di daerah perdesaan Jawa terjadi penurunan ketimpangan, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam golongan pendapatan yang paling rendah. Di luar Jawa kesenjangan lebih rendah dibandingkan di luar Jawa, dan penurunan kesenjangan di desa malah lebih besar. Peningkatan persentase terbesar dalam kesenjangan personal yang diukur oleh indeks gini tidak terjadi di Jakarta tapi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY (Booth, 1992) dalam Kuncoro (2006). Begitupun setelah tahun 1980, ketika penurunan kesenjangan terjadi di kota-kota di Indonesia. Penurunan terjadi di Jakarta dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, kesenjangan meningkat antara tahun 1980-1984, sementara penurunan sedikit tampaknya terjadi di Jawa Tengah dan DIY.

#### **4) Kesenjangan antara Kelompok Sosial Ekonomi**

Seperti diketahui di Indonesia pendidikan merupakan ukuran yang penting dalam menentukan pendapatan. Hal ini diakibatkan karena akses terhadap pekerjaan dengan gaji tinggi baik di sektor pemerintahan maupun swasta tergantung dari tingginya tingkat pendidikan. Selama tahun 1970an penghasilan pekerja yang

berkualifikasi tinggi meningkat dibandingkan dengan rata-rata nasional, karena permintaan akan tenaga kerja ini melampaui penawarannya. Beberapa survei yang dilakukan akhir 1960 dan 1970an, mengestimasi perbedaan antara penghasilan rumah tangga di mana kepala rumah tangga sebagai pegawai negeri dibandingkan dengan rata-rata penghasilan kelompok lain. Perbedaan ini melebar pada tahun 1970an di hampir semua kota.

Namun akhir tahun 1970an dan awal 1980an nampak bahwa perbedaan antara para pekerja profesional berpendidikan dan teknik dan lainnya mulai menyempit. Derajat perbedaan penghasilan dalam setiap kelas ini, seperti yang diukur dengan indeks gini juga menurun dalam periode ini.

### **2.2.3 Inflasi**

Di dalam teori ekonomi cukup banyak definisi atau pengertian mengenai inflasi. Definisi inflasi yang sering digunakan pada tingkat-tingkat awal setelah perang dunia kedua menurut A.P. Lehner antara lain: inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Gunawan, 1991:1). Kelebihan permintaan ini dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (*level of spending*), untuk komoditi akhir dibanding tingkat output maksimal yang dapat dicapai dalam jangka panjang, dengan sumber-sumber produksi tertentu.

Definisi menurut F.W. Paish adalah pendapatan nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan

nasional riil) (Gunawan, 1991:2). Sedangkan Nopirin mengemukakan inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum yang berlaku terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi (nopirin, 1992:25).

Boediono (1998) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Dari definisi tersebut ada beberapa hal penting yang patut diperhatikan yang merupakan syarat untuk diidentifikasi terjadinya inflasi.

1. Pengertian “umum” artinya kenaikan harga yang terjadi bukan hanya untuk salah satu atau dua barang saja, melainkan keseluruhan atau sebagian besar barang-barang. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak akan disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain.
2. Pengertian “terus menerus” artinya bahwa kenaikan harga terjadi di dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak bersifat sporadis atau temporer. Dengan demikian kenaikan harga umum barang secara terus menerus harus terjadi selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, walaupun dengan persentase besar, tidak dapat disebut sebagai inflasi.

3. Perlu diperhatikan bahwa persentase kenaikan harga berbagai macam barang tidak harus sama, mungkin saja terjadi kenaikan harga tidak bersamaan.

Beberapa pengertian yang patut digarisbawahi dalam definisi tersebut adalah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. *Tendency*/kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga yang tetap menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.
2. *Sustained*. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu tertentu saja, melainkan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
3. *General level of prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya harga dari satu macam barang saja.

Faktor-faktor pemicu laju kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagian ditentukan dari sudut pandang teori inflasi yang dianut. Pada kasus perekonomian di Indonesia paling tidak terdapat beberapa faktor yang baik secara langsung maupun secara psikologis dapat mendorong trend kenaikan tingkat inflasi. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi di negara kita antara lain dapat diidentifikasi berikut ini (Chandra, 2006):

1. Adanya peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar ini di Indonesia disebabkan antara lain oleh peristiwa:
  - a. Kenaikan harga migas di luar negeri
  - b. Meningkatnya bantuan luar negeri
  - c. Masuknya modal asing, khususnya investasi portfolio di pasar uang
  - d. Meningkatnya anggaran pemerintah secara mencolok
  - e. Depresiasi nilai Rupiah dan gejolak mata uang konvertibel
2. Adanya tekanan pada tingkat harga umum, yang dapat dipengaruhi oleh kejadian kejadian berikut ini :
  - a. Penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan
  - b. Peningkatan harga komoditi umum secara mendadak
  - c. Pencabutan program subsidi BBM
  - d. Kenaikan harga BBM yang mencolok
  - e. Kenaikan tarif listrik
3. Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor non-migas, maupun kebijakan lainnya yang bersifat distortif seperti antara lain:
  - a. Lonjakan inflasi setelah dikeluarkannya kebijakan devaluasi
  - b. Kebijakan tata niaga yang menciptakan pasar yang oligopolistis dan monopolistis.

- c. Pungutan-pungutan yang dikenakan dalam perjalanan lalu lintas barang dan mobilitas tenaga kerja.
  - d. Kebijakan peningkatan tingkat upah minimum regional.
4. Peningkatan pertumbuhan *agregat demand* yang dipicu oleh perubahan selera masyarakat, atau kebijakan pemberian bonus perusahaan dan faktor spekulatif lainnya:
- a. Pemberian bonus THR mendekati jatuhnya hari raya.
  - b. Pemberian bonus prestasi perusahaan
  - c. Perkembangan pusat belanja yang ekspansif dengan mematikan fungsi keberadaan pasar tradisional di lokalitas tertentu.

Pada masa lalu pencetus inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh inflasi yang berasal dari impor bahan baku dan penolong. Hal ini beralasan karena sebagian besar dari bahan baku tersebut masih diimpor dari luar negeri, akibat struktur industri yang sedikit mengandung *local content*. Dua faktor dapat berpengaruh atas kenaikan harga di dalam negeri. (1) Jika terjadi kelangkaan pasokan akibat gangguan logistik atau perubahan permintaan dunia atas bahan baku tersebut di dunia. (2) Jika terjadi penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing utama seperti dollar Amerika Serikat.

Saat ini inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak bumi di pasar internasional, yang dapat mendorong lebih lanjut biaya pengadaan sumber energi listrik dan bahan bakar untuk sebagian besar pabrik-pabrik

pengolahan. Di masa depan ancaman lonjakan harga minyak bumi masih akan mengancam inflasi di negara kita. Potensi kelangkaan bahan baku batubara dan gas akan juga terjadi dan mengakibatkan kenaikan biaya energi. Di samping itu ancaman jangka menengah atas kemungkinan terjadinya inflasi di beberapa daerah di Indonesia adalah akibat adanya kelangkaan bahan makanan pokok masyarakat yang timbul akibat paceklik, hama penyakit, dan penurunan produktivitas padi, kedelai dan kacang-kacangan. Memang inflasi pada tingkat yang rendah merupakan perangsang bagi produsen untuk menambah kapasitas produksinya; tetapi jika terlalu tinggi akan memberikan dampak negatif atas meningkatnya ketidakpastian dan penurunan daya beli konsumen, sekaligus potensi penjualan perusahaan.

Ada berbagai macam cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang dipilih tergantung pada tujuannya. Boediono (2005) menggolongkan inflasi sebagai berikut: Pertama, penggolongan didasarkan parah tidaknya inflasi tersebut yang terdiri dari: (1) inflasi ringan (di bawah 10% setahun), (2) inflasi sedang (antara 10% -30% setahun), (3) inflasi berat (antara 30% -100% setahun), (4) hiperinflasi (di atas 100% setahun). Kedua, penggolongan yang di dasarkan oleh penyebab inflasi, yang terdiri dari: (1) inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat, akan berbagai macam barang terlalu kuat, yang biasa disebut sebagai *demand inflation*, (2) inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, yang biasa disebut sebagai *cost inflation*. Ketiga, penggolongan yang di dasarkan dari asal inflasi, meliputi: (1) inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic*

*inflation*), inflasi ini timbul misalnya karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal, (2) inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu inflasi di luar negeri/negara-negara langganan berdagang negara kita). Kenaikan harga barang-barang yang kita impor menyebabkan: (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi, dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor, (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.

#### **2.2.4 Masalah Pengangguran**

Sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Hal ini dimungkinkan karena kombinasi dua aktor yaitu: (1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru, (2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labour saving*) di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan (Todaro, 1995). Atas

dasar pengalaman itulah, banyak pakar pembangunan menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di negara dunia ketiga perlu menitikberatkan pada promosi pertumbuhan sektor industri perkotaan yang cepat. Kencenderungan terlihat bahwa perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Strategi industrialisasi yang cepat pada banyak kasus, gagal membawa dampak yang diinginkan. Dewasa ini banyak negara sedang berkembang dihadapkan pada kondisi unik dari kombinasi permasalahan pergerakan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar, setagnannya produktivitas pertanian, dan meningkatnya pengangguran serta *underemployment* di daerah perkotaan dan perdesaan.

#### **2.2.4.1 Kondisi Pengangguran dan *Underemployment* Di Indonesia**

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran di Indonesia yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali, maupun yang pernah bekerja. Sedang pekerja yang digolongkan setengah penganggur (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah 1/3 jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu), setengah penganggur sukarela adalah setengah penganggur tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu), setengah penganggur terpaksa adalah setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan atau bersedia

menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah bila termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan mencari pekerjaan (BPS, 2002). Berdasarkan tabel 2.3 menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Terlihat bahwa pada tahun 1999-2001 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja dalam angkatan kerja mengalami peningkatan dari 67,2% pada tahun 1999 menjadi 68,6 pada tahun 2001. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan. Hal ini dapat dimengerti karena tingkat partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA (usia 13 – 18 tahun) adalah lebih tinggi di daerah perkotaan.

Sebagaimana halnya negara sedang berkembang lainnya, pengangguran terbuka merupakan fenomena perkotaan. Tingkat pengangguran di perkotaan tiga kali lebih tinggi di banding daerah perdesaan. Hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja di kota, yang pada gilirannya menyebabkan persaingan merebut lapangan kerja semakin ketat. Sampai dengan tahun 2001 tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,10 % di mana pengangguran terbuka di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing mencapai 11 dan 6,1 %.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi untuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa tahun 2001 tingkat pengangguran terbuka untuk yang berpendidikan SLTA atau lebih tinggi mencapai 14,7 %. Untuk daerah perkotaan, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi secara umum lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 2.3  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Pengangguran Terbuka

	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>Pengangguran Terbuka</b>
<b>1999</b>	67,2	<b>5,87</b>
<b>2000</b>	67,8	<b>6,10</b>
<b>2001</b>	68,6	<b>8,10</b>
<b>2002</b>	67,76	<b>9,14</b>
<b>2003</b>	67,86	<b>9,38</b>
<b>2004</b>	67,54	<b>9,86</b>
<b>2005</b>	68,02	<b>10,30</b>

Sumber : BPS 2006

Keterbatasan peluang kerja di luar sektor pertanian (sektor modern atau industri) yang dapat menyerap pekerja tidak hanya memunculkan masalah pengangguran terbuka tetapi juga masalah setengah pengangguran. Karena ada perbedaan dalam struktur ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di kedua kawasan ini berbeda. KBI dengan struktur ekonomi lebih modern dibandingkan dengan KTI menunjukkan angka pengangguran terbuka yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan Indonesia Timur. Rata-rata pengangguran terbuka di KTI sekitar 5,4% sementara di KBI 6%. Bila dicermati bahwa angka pengangguran terbuka cukup tinggi di propinsi yang perekonomiannya relatif maju, seperti Jakarta (13,2%), Jawa Barat (9,0%) di KBI, dan di Kalimantan Timur (7,7%) dan Sulawesi Selatan (6,455) di KTI. Hanya perlu dicatat bahwa di Sulawesi Utara 9,3% agak berbeda dengan daerah lain karena di daerah ini pengangguran terbuka ada kaitan dengan tingkat pendidikan.

Tabel 2.4

## Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006

Pendidikan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Tidak/Belum Pernah sekolah	6,1	3,5	4,0
Tidak/Belum Tamat SD	6,0	2,9	3,7
SD	7,3	4,5	5,3
SLTP	10,2	10,9	10,6
SLTA Umum	16,5	16,2	16,4
SLAT Kejuruan	15,7	11,7	14,5
Diploma 1/2/3 & Akademi	12,4	8,1	11,2
Universitas	10,9	10,4	10,8
Total	11,0	6,1	8,1
SLTA +	15,1	13,6	14,7

Sumber: BPS 2006

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan bahwa yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasinya, yaitu berupa bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan berusaha

mencari pekerjaan itu di kota atau di propinsi atau daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industri antar sektor modern telah berkembang, sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau propinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah itu rendah. Pada umumnya, orang yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, maka bersedia untuk bekerja di sektor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting adalah bertahan hidup. Gejala ini nampak cukup menonjol di KTI, tidak mengherankan bila penduduk yang bekerja di sektor informal dan setengah pengangguran di KTI yakni sekitar 76,9% dan 47,1%. Bila diamati pada setiap propinsi di KTI, angka setengah pengangguran dan pekerja sektor informal cukup tinggi, seperti di propinsi Papua yaitu 47,1% dan 76,9% di Maluku masing-masing 51,7% dan 79,4%; Sulawesi Selatan masing-masing 53,5% dan 78,3% ; Sulawesi Tenggara masing-masing 46,7% dan 80,05% ; NTT masing-masing 59,4% dan 88,95%. Dari sisi ketenagakerjaan angka tersebut menunjukkan cukup besar SDMnya di daerah itu yang belum dimanfaatkan secara penuh. Akibatnya kondisi sosial cukup memprihatinkan dan rawan terhadap berbagai macam gejolak sosial.

Sementara itu berdasarkan jenis kelamin pengangguran antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun dalam persentase yang berbeda. Pengangguran laki-laki menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yang menarik tingkat pengangguran pada tahun 2000 antara laki-laki dan perempuan menunjukkan posisi yang hampir sama. Lebih lanjut lagi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya, terutama sejak tahun 1990 sampai dengan 2004. TPT mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu semula 2,5% menjadi 9,9% menurut jkebis kelamin, TPT perempuan (12,9%) lebih tinggi dibanding TPT laki-laki (8,1%).

### **2.2.5 Hubungan antara Pendapatan, Inflasi, Pengangguran, Rasio Gini, dan Tingkat Kemiskinan**

Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara: (1) jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dan *consumption poverty rate*. (2) jika rumah tangga tersebut tidak memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek

Tabel 2.5

Pengangguran Terbuka, Setengah Pengangguran, dan Pekerja Sektor Informal  
Menurut Propinsi Tahun 2006

<b>Propinsi</b>	<b>Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>Setengah Pengangguran(%)</b>	<b>Pekerja Sektor Informal (%)</b>
INDONESIA BARAT			
Aceh	6,8	48,8	75,4
Sumatera Utara	6,6	37,6	67,3
Sumatera Barat	5,9	46,7	73,0
Riau	6,8	39,9	70,9
Jambi	4,2	42,8	73,9
Sumatera Selatan	5,5	42,8	68,3
Bengkulu	3,8	34,9	78,7
Lampung	3,7	39,1	71,7
DKI Jakarta	13,2	12,4	38,6
Jawa Barat	9,0	36,0	58,9
Jawa Tengah	5,6	41,1	64,6
Yogyakarta	4,7	34,4	63,6
Jawa Timur	5,0	46,6	61,6
Bali	3,5	36,3	68,7
Rata-rata	6,0	38,5	66,8
INDONESIA TIMUR			
NTB	4,7	54,1	69,0
NTT	2,8	59,4	88,9
Kalimantan Barat	4,7	44,3	75,5
Kalimantan Tengah	4,0	34,9	76,2
Kalimantan Selatan	3,9	43,9	78,1
Kalimantan Timur	7,7	31,2	66,4
Sulawesi Utara	9,3	39,0	67,6
Sulawesi Tengah	4,0	45,3	78,1
Sulawesi Selatan	6,4	53,5	78,3
Sulawesi Tenggara	5,8	46,7	80,0
Maluku	7,6	51,7	79,4
Papua	3,4	61,1	85,4
Rata_rata	5,4	47,1	76,9

Sumber: Kuncoro (2006)

Secara umum sebagian besar rumah tangga tergantung pada upah atau gaji yang diterimanya, sehingga terjadinya pengangguran akan menyebabkan hilangnya sebagian besar penerimaan. Lebih jauh masalah pengangguran ini lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga menyebabkan harus hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor ini diramalkan akan menyebabkan hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan variabel inflasi dinilai berhubungan dengan peningkatan ketidakpastian tentang keadaan di masa yang akan datang. Inflasi dapat mengurangi pendapatan riil permanen sehingga mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dengan cara meningkatkan *discount rate* aliran pendapatan pada periode yang akan datang sehingga cenderung meningkatkan *consumption poverty rate*. Secara lebih spesifik, hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara: (1) inflasi cenderung menguntungkan pihak peminjam uang dan merugikan pihak yang meminjamkan. Adanya *liquidity constraint* dan akses yang tidak mudah untuk memperoleh fasilitas keuangan menyebabkan kekayaan riil kekayaan miskin cenderung semakin berkurang akibat adanya inflasi. (2) cara kedua adalah adanya kecenderungan sebagian rumah tangga yang terlambat menyesuaikan pola konsumsi mereka dengan perubahan tingkat harga yang berlangsung lebih cepat. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Bila dihubungkan dengan kelompok penduduk miskin, dapat dikatakan bahwa inflasi merupakan *regressive tax* yang cenderung lebih membebani penduduk miskin.

Kenaikan tingkat harga sejumlah tertentu akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan kelompok penduduk miskin dalam proporsi (%) yang lebih besar daripada kelompok penduduk berpendapatan lebih tinggi.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan negatif (-) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Tingkat inflasi berpengaruh signifikan positif (+) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan positif (+) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Indeks gini berpengaruh signifikan positif (+) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
5. Diduga variabel tingkat pengangguran mempunyai pengaruh dominan dengan variabel tingkat kemiskinan di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif untuk tahun 1991-2005 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Variabel tingkat kemiskinan ( $P_t$ )

Pada penelitian ini variabel tingkat kemiskinan, yang merupakan variabel dependen didefinisikan sebagai tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke  $t$ , diukur dengan menggunakan persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.

b) Variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ )

Pada penelitian ini variabel pendapatan didefinisikan sebagai tingkat pendapatan tahun ke  $t$ , diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 1993.

c) Variabel tingkat inflasi ( $p_t$ )

Pada penelitian ini variabel inflasi didefinisikan sebagai tingkat inflasi pada tahun ke  $t$ , diukur dengan menggunakan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia.

d) Variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ )

Pada penelitian ini variabel pengangguran didefinisikan sebagai tingkat pengangguran pada tahun ke t, diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran terbuka.

e) Variabel rasio gini ( $G_t$ )

Pada penelitian ini variabel rasio gini didefinisikan sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur dengan menggunakan rasio gini pada tahun ke t.

### 3.3 Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrik yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991) yang digunakan untuk menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang meliputi empat variabel terdiri dari: rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata, inflasi, tingkat pengangguran, dan rasio gini. Adapun model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometrik yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991) yaitu:

$$P_t = \beta_0 + \beta_1 (Y)_t + \beta_2 p_t + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + e_t$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kevaliditasan dari hasil regresi ini yang meliputi :

### **3.3.1 Pengujian Asumsi Klasik**

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linier berganda dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model analisis regresi linier berganda yang dipergunakan akan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) maka model regresi tersebut harus memenuhi dasar teori regresi klasik. Model regresi linier berganda akan lebih tepat digunakan jika memenuhi asumsi sebagai berikut:

#### **3.3.1.1 Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati, karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan juga untuk dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya. Bila nilai probabilitas signifikansi di atas nilai tingkat kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ) maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2005:31).

#### **3.3.1.2 Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi linier berganda adalah dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *Cutoff* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2005:92).

### 3.3.1.3 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan metode *Spearman Rank Correlation*, dengan rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$r^s = \frac{1 - 6 \sum D_i^2}{N(N^2 - 1)}$$

Dimana :

$r^s$  = Koefisien *Rank Spearman* antara *disturbance term* dengan variabel bebas.

$D_t$  = Perbedaan antara rangking *residual* dengan rangking variabel bebas.

$N$  = Jumlah observasi.

Apabila nilai koefisien korelasi antara variabel bebas dengan residu lebih kecil dari  $r$ -tabel atau nilai probabilitas koefisien korelasi lebih besar dari toleransi kesalahan yang digunakan ( $\alpha$ ), maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya apabila nilai koefisien korelasi antara variabel bebas dengan residu lebih besar dari  $r$ -tabel atau nilai probabilitas koefisien korelasi lebih kecil dari toleransi kesalahan yang digunakan ( $\alpha$ ), maka terjadi gejala Heteroskedastisitas.

#### 3.3.1.4 Autokorelasi

Menurut Piet Rietveld dan Lasmono Tri Sunaryanto (1993:56) autokorelasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi antara data-data pengamatan, atau dengan perkataan lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika gejala korelasi serial terjadi, akan menimbulkan varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah dari pada semestinya yang mengakibatkan  $R^2$  menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

Pengujian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson, yaitu dengan membandingkan nilai DW dari hasil regresi dengan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  dari tabel DW.

Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh =

- a. Nilai tabel DW untuk  $d_L(\alpha, k, n) = (0,05, 4, 15) = 0,685$ .

b. Nilai tabel DW untuk  $dU (\alpha, k, n) = (0,05, 4, 15) = 1,977$ .

Jika :

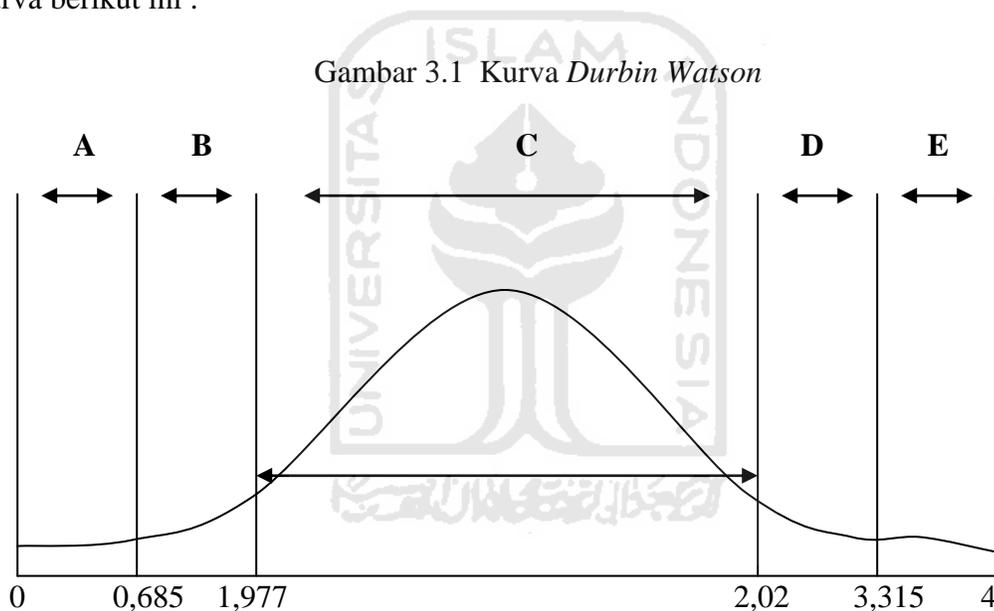
$dU < DW < 4 - dU$ , maka tidak terdapat autokorelasi.

$DW < dL$  atau  $DW > 4 - dL$ , maka terdapat autokorelasi.

DW pada daerah keragu-raguan, maka dianggap tidak ada kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan uji Autokorelasi dapat dilihat pada gambar

kurva berikut ini :



Keterangan :

A = Ada autokorelasi positif

B = Tanpa kesimpulan/daerah keragu-raguan

C = Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif

D = Tanpa kesimpulan/daerah keragu-raguan

E = Ada autokorelasi negatif

### 3.3.2 Uji t

Pada hipotesis 1 dapat dilakukan dengan uji t untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat (tidak bebas) secara parsial (individual). Untuk menguji tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi yang diperoleh dari perhitungan, maka pada pengujian parsial ini, prosedurnya dimulai dengan dirumuskannya hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_{a1}$ ) bagi setiap koefisien regresi (Ghozali, 2005:92).

- a)  $H_{a1} : b_i < 0$  artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.
- b)  $H_{a2} : b_i > 0$  artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Setelah langkah di atas maka selanjutnya adalah menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) dan *degree of freedom* (df) dengan rumus  $n-k-1$  guna mengetahui t tabel untuk uji dua sisi. Langkah yang dilakukan adalah menentukan nilai t hitung dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{SE(b_i)}$$

Dimana :

$b_i$  = Koefisien regresi (ke i)

SE = Standar Error

Uji t dipergunakan untuk menguji parameter. Uji t merupakan uji statistik yang telah dipergunakan secara luas dalam analisis regresi untuk menguji hipotesis bahwa koefisien regresi berbeda secara nyata dari nol. Hipotesa diformulasikan dengan

harapan ditolak dinamakan hipotesa nol ( $H_0$ ). Dengan menolak  $H_0$  berarti akan menerima hipotesa alternatif ( $H_1$ ). Prosedur pengujiannya adalah :

- 1) Level signifikan  $\alpha/2 = 5\%$
- 2) *Degrees of freedom*  $n$
- 3) Kriteria pengujian

$H_0$  diterima apabila :  $t \text{ hitung} < t_{\alpha/2, n-2}$

$H_0$  ditolak apabila :  $t \text{ hitung} > t_{\alpha/2, n-2}$

### 3.3.3 Uji F

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F, yaitu untuk menguji secara serempak apakah nilai parameternya mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Langkah-langkahnya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Hipotesis

$H_0$  :  $b_i = 0$  artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

$H_{a1}$  :  $b_i \neq 0$  artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Menentukan tingkat *Confident of Level* ( $\alpha = 5\%$ ) dan df dengan rumus  $n-k$  untuk mengetahui f tabel.

- 2) Mencari F hitung (Kuncoro, 2004: 83)

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

### 3.3.4 Goodness of Fit ( $R^2$ )

$R^2$  digunakan untuk memberikan proporsi atau variasi total dalam variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh variabel dengan model regresi yang berisi lebih dari 2 variabel. *Goodness of Fit* (  $R^2$  ) digunakan untuk mengetahui ketepatan atau kecocokan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi dan untuk mengukur besarnya proporsi (%) atau variasi perubahan variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1 semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1) berarti semakin cocok suatu garis regresi dan sedemikian besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan rumusnya yaitu (Gujarati, 2002: 186):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$
$$= 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

$$TSS = RSS + ESS$$

Keterangan :

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = jumlah kuadrat residual

TSS = jumlah total kuadrat

$R^2$  terletak antara 0 dan 1.

Jika  $R^2 = 1$ , berarti garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100% variasi Y.

Jika  $R^2 = 0$ , berarti model tersebut tidak menjelaskan variasi Y. Tetapi yang khas  $R^2$

akan terletak diantara nilai ekstrim tadi kecocokan model dikatakan “lebih baik” jika

$R^2$  mendekati 1.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1991-2005. Berdasarkan data tersebut diperoleh statistik deskriptif yang mencakup  $n$  atau banyaknya data yang diperoleh masing-masing variabel sebanyak 15 sampel ( $N$ ), rata-rata (*mean*) variabel tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) adalah sebesar 17,14; pendapatan ( $Y_t$ ) sebesar 4,10; inflasi ( $\rho_t$ ) sebesar 14,57; pengangguran ( $\mu_t$ ) sebesar 6,64; indeks gini ( $G_t$ ) sebesar 0,33 dan standar statistik variabel tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) adalah sebesar 3,56; pendapatan ( $Y_t$ ) sebesar 5,18; inflasi ( $\rho_t$ ) sebesar 18,02; pengangguran ( $\mu_t$ ) sebesar 2,16; indeks gini ( $G_t$ ) sebesar 0,017.

#### 4.2 Hasil dan Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis regresi linear berganda. Model ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ), tingkat inflasi ( $\rho_t$ ), tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.

#### 4.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Model persamaan regresi linier berganda dapat diterima secara ekonometrika jika memenuhi syarat *Best Linier Unbiased Efficient Estimator (BLUE)* dan memenuhi asumsi dasar klasik, antara lain memenuhi uji normalitas, bebas dari multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi tersebut.

##### 4.2.1.1 Pengujian Normalitas

Pada pengujian hipotesis data setiap variabel penelitian perlu dulu diuji normalitasnya. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai Z dari Kolmogorov-Smirnov, di mana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung dengan probabilitas signifikansi di bawah  $\alpha = 5\%$  ini berarti tidak distribusi normal (Ghozali, 2005:31). Dari data tabel 4.1 memperlihatkan bahwa distribusi data dinyatakan normal. Berikut ini akan ditampilkan uji normalitas dengan bantuan SPSS Versi 15:

Tabel 4.1:  
Uji Normalitas

Variabel	Nilai Kolmogorov-Smirnov	Probabilitas Signifikansi	Kesimpulan
Tingkat Pendapatan	1,226	0,099	Normal
Tingkat Inflasi	1,335	0,057	Normal
Tingkat Pengangguran	1,016	0,253	Normal
Indeks Gini	0,627	0,826	Normal
Tingkat Kemiskinan	0,623	0,832	Normal

Sumber : lampiran 4

##### 4.2.1.2 Pengujian Multikolinieritas

Pengujian asumsi dengan multikolinieritas dilakukan dengan mendeteksi besaran nilai *variance inflation factor* atau *VIF* dan *tolerance* atau dengan melihat

besaran korelasi antar variabel independen. Berikut ini akan ditampilkan tabel yang berkaitan dengan pengujian asumsi klasik multikolonieritas:

Tabel 4.2:  
Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance Value	VIF	Kesimpulan
Tingkat Pendapatan	0,437	2,733	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Tingkat Inflasi	0,235	3,399	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Tingkat Pengangguran	0,670	1,492	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Indeks Gini	0,470	2,127	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber : lampiran 5

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa VIF untuk masing-masing variabel adalah tingkat pendapatan ( $Y_t$ ) sebesar 2,733; tingkat inflasi ( $p_t$ ) adalah sebesar 3,399; tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ) adalah sebesar 1,492; indeks gini ( $G_t$ ) adalah sebesar 2,127. Berdasarkan pedoman suatu regresi bebas multikolonieritas bila nilai VIF semua variabel independen di bawah nilai 10 dan nilai toleransi di atas 0,1 (Hair, 1995). Oleh karena itu dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.

#### 4.2.1.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 4.3:  
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas	Kesimpulan
Tingkat Pendapatan	0,761	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Inflasi	0,595	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Pengangguran	0,644	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Indeks Gini	0,820	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : lampiran 6

Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dengan  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat nilai probabilitas

korelasi antara variabel residu dengan variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ) adalah sebesar 0,761 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan antara residu dengan variabel variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ) tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas korelasi antara variabel residu dengan variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) adalah sebesar 0,595 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan antara residu dengan variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) tidak terjadi heteroskedastisitas.

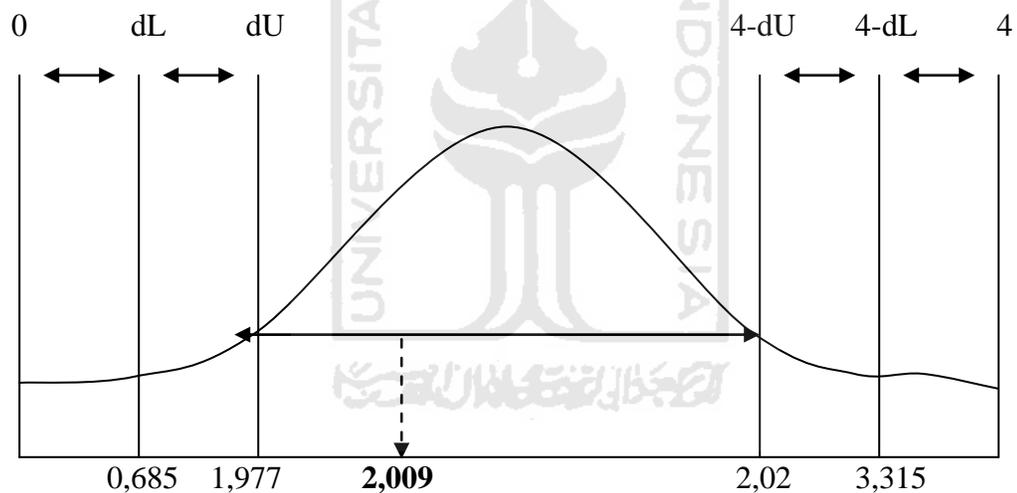
Nilai probabilitas korelasi antara variabel residu dengan variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ) adalah sebesar 0,644 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan antara residu dengan variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ) tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas korelasi antara variabel residu dengan variabel indeks gini ( $G_t$ ) adalah sebesar 0,820 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan antara residu dengan variabel indeks gini ( $G_t$ ) tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4.2.1.4 Pengujian Autokorelasi**

Pengujian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin - Watson, yaitu dengan membandingkan nilai DW dari hasil regresi dengan nilai dL dan dU dari tabel DW. Pada hasil perbandingan *d value* hasil olah regresi dengan *d value* pada tingkat signifikansi 5 % dapat dilihat pada lampiran tabel Durbin Watson dan selanjutnya akan diperjelas pada tabel 4.4.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa *d value* regresi terletak di antara  $dU$  dan  $4 - dU$  atau  $1,977 < DW < 2,02$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi antar masing-masing variabel bebas, sehingga model regresi yang terbentuk dari nilai variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia hanya dijelaskan oleh variabel bebas yang meliputi variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ), tingkat inflasi ( $\rho_t$ ), tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ), indeks gini ( $G_t$ ). Berikut ini gambar yang menunjukkan hasil perbandingan nilai DW

Gambar 4.1 Kurva *Durbin Watson*



Tabel 4.4:  
Perbandingan *d value* signifikansi 5 %

Keterangan	Nilai
dL	0,685
dU	1,977
<i>d value</i> regresi	<b>2,009</b>
4 - dU	2,02
4 - dL	3,315

Sumber : lampiran 7

#### 4.2.2 Regresi linier Berganda

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15,0 perhitungan seperti pada lampiran 3, dan ringkasan hasil program yang terdiri atas koefisien, nilai t, dan signifikan seperti pada tabel 4.5 berikut ini :

**Tabel 4.5. Hasil Pengujian Regresi**

	Koefisien	t	Sig	Koefisien Beta ( $\beta$ )
<b>Konstanta</b>	26,200	1,623	0,014	
<b>Y<sub>t</sub></b>	-0,705	-3,005	0,034	-0,703
<b><math>\rho_t</math></b>	0,059	1,282	0,784	0,297
<b><math>\mu_t</math></b>	0,155	2,390	0,027	0,094
<b>G<sub>t</sub></b>	0,713	2,312	0,047	0,092

Sumber : lampiran 3

Std. Error of Est.	= 2,32973	R	= 0,891
Adjusted R Squared	= 0,845	F Ratio	= 3,912
R Squared	= 0,861	Probabilitas	= 0,001

Dari tabel 4.1 tersebut di atas didapat persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 26,200 - 0,705 Y_t + 0,059 \rho_t + 0,155 \mu_t + 0,713 G_t + e_t$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Konstanta

Jika variabel independen (tingkat pendapatan/ $Y_t$ , tingkat inflasi/ $\rho_t$ , tingkat pengangguran/ $\mu_t$ , dan indeks gini/ $G_t$ ) dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia sebesar 26,200%.

b. Variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ )

Variabel pendapatan ( $Y_t$ ) merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,705. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan variabel pendapatan ( $Y_t$ ) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) akan menurun sebesar 0,705%.

c. Variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ )

Variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,059. Hal ini berarti apabila setiap penambahan variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) akan meningkat sebesar 0,059%.

d. Variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ),

Variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ), merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,155. Hal ini berarti apabila setiap penambahan variabel pengangguran ( $\mu_t$ ) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) akan meningkat sebesar 0,155%.

e. Variabel indeks gini ( $G_t$ )

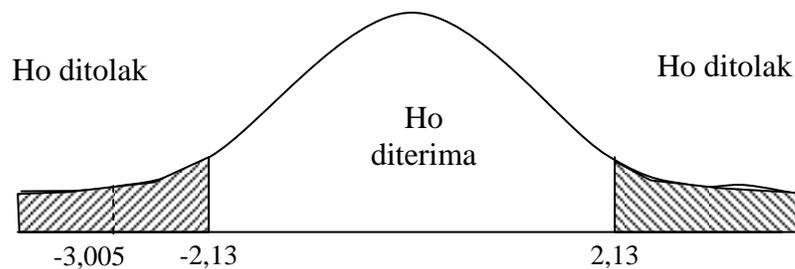
Variabel indeks gini ( $G_t$ ) merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,713. Hal ini berarti apabila setiap penambahan variabel indeks gini ( $G_t$ ) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) akan meningkat sebesar 0,713%.

### 4.2.3 Uji Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t)

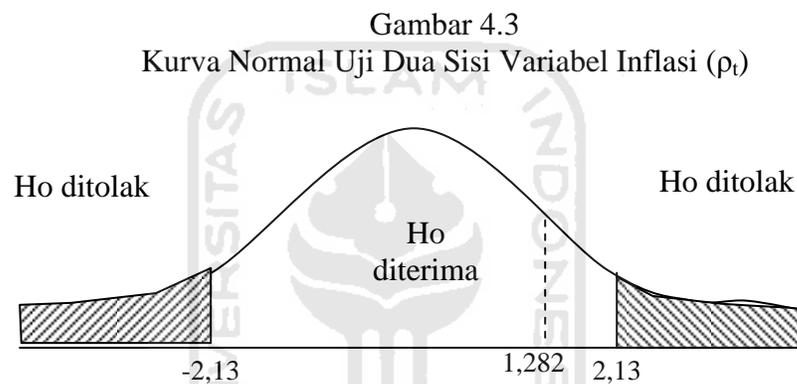
Analisis dari uji parsial (uji t), dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis kelima dari penelitian yang menyatakan bahwa variabel indeks gini ( $G_t$ ) berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikan 95 % ( $\alpha = 0,05$ ).

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Untuk uji dua sisi, dengan taraf signifikan sebesar 95 % ( $\alpha = 0,05$ ) dan sampel sejumlah 15, maka diperoleh t-tabel sebesar 2,13. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambar kurva normal untuk uji t dua sisi :

Gambar 4.2  
Kurva Normal Uji Dua Sisi Variabel pendapatan ( $Y_t$ ),



Untuk variabel pendapatan ( $Y_t$ ), diperoleh t-hitung sebesar -3,005 dan t-tabel sebesar 2,13 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel pendapatan ( $Y_t$ ) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,034 yang di bawah 0,05.

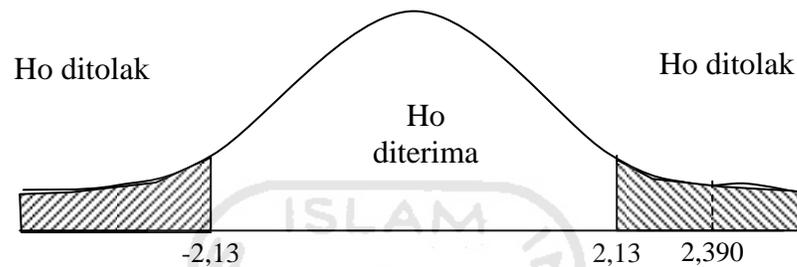


Untuk variabel inflasi ( $\rho_t$ ) diperoleh t-hitung sebesar 1,282 dan t-tabel sebesar 2,13 yang berarti t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel inflasi ( $\rho_t$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,784 yang di atas 0,05.

Untuk variabel pengangguran ( $\mu_t$ ) diperoleh t-hitung sebesar 2,390 dan t-tabel sebesar 2,13 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel pengangguran ( $\mu_t$ ) berpengaruh signifikan terhadap

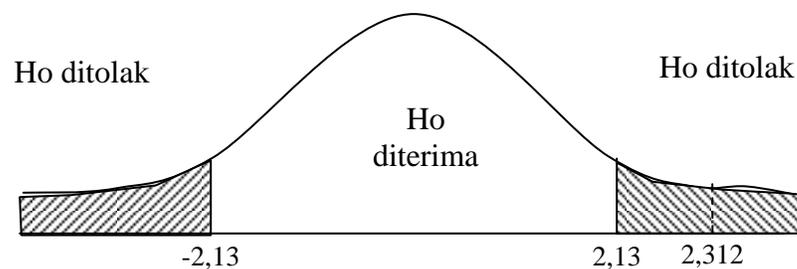
tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,027 yang di bawah 0,05.

Gambar 4.4  
Kurva Normal Uji Dua Sisi Variabel Pengangguran ( $\mu_t$ )



Untuk variabel indeks gini ( $G_t$ ) diperoleh t-hitung sebesar 2,312 dan t-tabel sebesar 2,13 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel indeks gini ( $G_t$ ) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,047 yang di bawah 0,05.

Gambar 4.5  
Kurva Normal Uji Dua Sisi Variabel Indeks Gini ( $G_t$ )



Tabel 4.6 berikut ini menunjukkan hasil rangkuman dari perhitungan perbandingan antara t-hitung dan t-tabel.

Tabel 4.6  
Tabel t-Hitung dan t-Tabel

Variabel	t-hitung	t-tabel	Keterangan
Pendapatan ( $Y_t$ )	-3,005	2,13	Berpengaruh Signifikan
Inflasi ( $\rho_t$ )	1,282	2,13	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pengangguran ( $\mu_t$ )	2,390	2,13	Berpengaruh Signifikan
Indeks gini ( $G_t$ )	2,312	2,13	Berpengaruh Signifikan

Sumber : lampiran 3

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) secara parsial terhadap variabel tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia juga dapat dilihat dari koefisien beta ( $\beta$ ). Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia adalah variabel pendapatan ( $Y_t$ ) dengan koefisien beta ( $\beta$ ) sebesar -0,703; variabel inflasi ( $\rho_t$ ) dengan koefisien beta sebesar 0,297; variabel pengangguran ( $\mu_t$ ) dengan koefisien beta sebesar 0,094; dan variabel indeks gini ( $G_t$ ) dengan koefisien beta sebesar 0,092. Dari keempat koefisien beta ( $\beta$ ) variabel bebas yang telah diuraikan tersebut di atas, yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan di Indonesia/ $P_t$ ) adalah variabel yang mempunyai koefisien beta ( $\beta$ ) terbesar, yaitu variabel pendapatan ( $Y_t$ ) sebesar -0,703. Hal ini berarti hipotesis kelima dari penelitian yang menyatakan bahwa pengangguran ( $\mu_t$ ) berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia tidak dapat diterima, karena nilai koefisien beta terbesar adalah variabel pendapatan ( $Y_t$ ) yaitu sebesar -0,703.

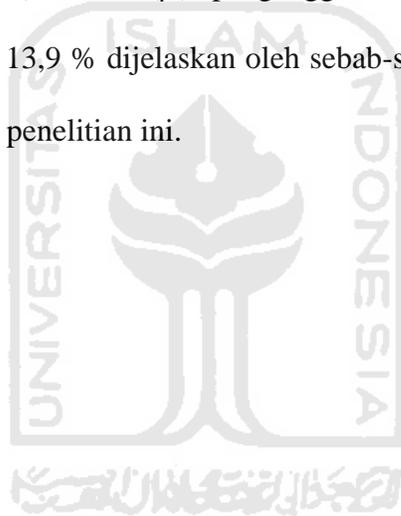
#### 4.2.4 Uji Hipotesis dengan Uji Serentak ( Uji F )

Analisis dari uji statistik ( uji F ), dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis dari penelitian yang menyatakan bahwa variabel-variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Uji F ini digunakan dengan cara membandingkan F-hitung yang dihasilkan dari regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi dengan taraf kepercayaan 95 % (  $\alpha = 0,05$  ). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 4.1 menunjukkan F-hitung yang dihasilkan sebesar 3,912 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut maka diketahui adanya korelasi secara simultan antara semua variabel bebas, yaitu variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) dengan tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari multiple R sebesar 0,891 yang menunjukkan hubungan secara simultan antara variabel-variabel pendapatan ( $Y_t$ ), inflasi ( $\rho_t$ ), pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) sebesar 89,1% hubungan ini cukup erat karena besarnya koefisien tersebut mendekati angka 100 % atau 1 (satu).

#### 4.2.5 *Goodness of Fit (R<sup>2</sup>)*

Selanjutnya untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi ganda (R Squared atau R<sup>2</sup>). Berdasarkan perhitungan seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 dapat dilihat hasil R Squared sebesar 0,861 dalam hal ini berarti 86,1 % tingkat kemiskinan (P<sub>t</sub>) di Indonesia bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdiri dari variabel pendapatan (Y<sub>t</sub>), inflasi (ρ<sub>t</sub>), pengangguran (μ<sub>t</sub>), dan indeks gini (G<sub>t</sub>). Sedangkan sisanya sebesar 13,9 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh pada variabel pendapatan ( $Y_t$ ), tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ) dan indeks gini ( $G_t$ ) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.
2. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ), tingkat inflasi ( $\rho_t$ ), tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.
3. Hasil analisis regresi linier berganda didapat nilai koefisien beta variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) paling besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dipengaruhi secara dominan oleh variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ).

#### **5.2 Implikasi**

1. Variabel tingkat pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat

pengangguran ( $\mu_t$ ), dan indeks gini ( $G_t$ ) dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia dan pada variabel tingkat pendapatan ( $Y_t$ ) bila semakin meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.

2. Variabel tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi ( $\rho_t$ ) mempunyai pengaruh (terlihat dari pengujian secara simultan) akan tetapi pengaruh tersebut tidak secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan ( $P_t$ ) di Indonesia.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dengan ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian berikutnya berkemungkinan untuk menambahkan variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya: faktor sumber daya alam serta penambahan jumlah tahun penelitian.
2. Kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan bagi para peneliti di tahun-tahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincoln,. (1997), *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko (1992), *Ekonomi Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam (2005), *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati Damodar (2002), *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Hartini,Dwi dan Yuni P. Utomo (2004), Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 5, No. 1, 42- 49.
- Kuncoro, Mudrajad (2006), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Octaviani, Dian (2001), Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia, *Media Ekonomi*, Volume 7, No. 2, 100-118.
- Putra, Sofyan E. (2007), Optimalisasi Zis dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 8, No. 1, 96- 111.
- Simamora, Bilson. (2002), *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukendar, Anang (2000), Pengujian dan Pemilihan Model Inflasi dengan *Nonested Test* Studi Kasus Perkeonomian Indonesia Periode 1969-1997, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Volume 15, No. 2, 164-178.
- Sutikno dan Prapto Yuwono (2000), Kausalitas Uang Beredar dan Inflasi, *Dian Ekonomi* Volume 6, No. 2, 318-327.
- Todaro, Michael P., 2000, *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*, Edisi 7, Erlangga, Jakarta.